PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA

Rozalinda Erita

Universitas Suryakencana

E-Mail: rozalindaerita@gmail.com

Masuk : 07 Oktober 2021	Penerimaan : 19 Januari 2022	Publikasi : 31 Januari 2022
-------------------------	------------------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan, dengan perspektif Indonesia sebagai negara Demokrasi Pancasila. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis menghasilkan Model Pilkada Pancasila sehingga Pilkada langsung dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang termaktub dalam Pancasila.

Kata Kunci : Demokrasi; Kedaulatan; Otonomi; Pancasila.

ABSTRACT

The people's sovereignty and democracy need to be emphasized by the direct election of Governors, Regents, and Mayors by the people, by making some basic improvements to various problems of direct elections that have been carried out so far, with the perspective of Indonesia as a Pancasila Democracy country. The research is descriptive analytical with a normative juridical approach. Data collection techniques by means of library research which is then analyzed qualitatively. The author produces a Pancasilaist Pilkada Model so that direct elections can be carried out by paying attention to the rules contained in Pancasila.

Keywords : Democracy; Sovereignty; Autonomy; Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi telah lahir di Indonesia sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir telah merumuskan berbagai model demokrasi. Mulai dari demokrasi yang diambil dari negara-negara Barat dan dijalankan secara Barat, yaitu Demokrasi Liberal (Parlemen), Bung Karno mencoba dengan Demokrasi Terpimpin, lalu Orde Baru mencari bentuk lain, yaitu Demokrasi Pancasila.

Asal-usul kata demokrasi merupakan gabungan dari kata Yunani: “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cratein*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. (Munir Fuady, 2010) Menurut

Diane Ravicth yang dikutip oleh Ajat Sudrajat mendefinikan demokrasi sebagai “pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas”. Definisi ini cerminan dari adanya konsep kedaulatan rakyat (*sovereignty of people*). (Ajat Sudrajat, 2015)

Pemahaman secara normatif menyatakan demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya terungkap dalam pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atau pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat. (Ajat Sudrajat, 2015)

Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi: partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat. (Ajat Sudrajat, 2015)

Beberapa ahli memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut : (Munir Fuady, 2010)

1. Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Philip C. Schmitter, demokrasi adalah suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

4. Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Lyman Tower Sargent, demokrasi mensyaratkan keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan, adanya persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya system pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.(Sunarso, n.d.)
6. Robert Dahl, mensyaratkan delapan hal cermin demokrasi yaitu kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul), kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat), hak memilih dan dipilih, kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public, hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan, alternatif sumber-sumber informasi, pemilu yang bebas dan adil, dan pelebagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.(Abdul Aziz Hakim, 2011)

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam beragama, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat disetiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945.

Sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara demokrasi konstitusional, dengan menganut asas demokrasi Pancasila. Dalam aktualisasinya, Demokrasi Pancasila didasarkan pada Pembukaan Undang

Undang Dasar 45 alinea ke 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila juga diartikan sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam menganut asas demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditaati dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila.

Eksistensi Kepala Daerah tidak terlepas dari Pemerintahan Daerah yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pengaturannya di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan.

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam praktek, pihak yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. (Nur Rohim Yunus, 2015)

Pemerintah berdasarkan atas demokrasi konstitusional tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konstitusi di sini diartikan dalam arti luas, sebagai *living constitution*, baik yang tertulis yang disebut Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ada dua

manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu yaitu, pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang otoritas dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi empat, yaitu: (Nur Rohim Yunus, 2015)

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas berikut terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Demokrasi Lokal dalam Perspektif Demokrasi Pancasila?, 2. Apa Evaluasi atas Pemilihan Kepala Daerah saat ini berdasarkan Parameter Pemilu Demokratis?, 3. Bagaimana Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila?

B. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan (Burhan Asafa, 2001) serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan kajian yuridis pemilihan kepala daerah dalam

perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Demokrasi Lokal dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, berdasarkan amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pelaksanaan Pilkada saat ini selain untuk menjamin terwujudnya Pilkada yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang baik, yaitu adanya bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*subsystems*) seperti *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. (Hamdan Zoelva, 2013)

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengubah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan September 2020 diundur jadi Desember 2020.

Pelaksanaan Pilkada saat ini yang berpedoman pada Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas, secara detail dan menyangkut hal-hal teknis pelaksanaan pemilihan baik proses maupun bagaimana tata cara setiap tahapan dilaksanakan telah dijabarkan dalam Peraturan KPU. Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak 2020 adalah :

- a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengatur jadwal setiap tahapan mulai tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- b. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota
 - k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan demikian telah terpenuhi *electoral regulation* atau *electoral law* atau kerangka hukum Pilkada yang khusus menjadi pedoman pemilihan sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam Pilkada, aturannya tidak multi tafsir, tidak saling bertentangan, dan dapat dilaksanakan.

Electoral process adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pilkada merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun bersifat teknis. Dalam hal ini *electoral process* telah diatur sesuai tahapan pilkada, sehingga tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara merujuk pada Peraturan KPU menjadi dasar pelaksanaan tahapannya.

Electoral law enforcement merupakan penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politis, administratif, atau pidana. Penegakan hukum Pilkada yang terbagi dalam kategori pidana pemilu, sengketa Pemilihan, pelanggaran administrasi, sengketa TUN, pelanggaran etik, serta sengketa hasil pemilu telah diserahkan kewenangannya masing-masing berdasarkan Undang-undang.

Tindak Pidana Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri. Sengketa Pemilihan, diperiksa oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran Administrasi, diperiksa oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pelanggaran Kode Etik diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta

Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai Badan Peradilan Khusus terbentuk.

Terpenuhinya ketiga bagian pilkada tersebut (*electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement*) sangat menentukan kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dan proses pemilu. Hal itu karena masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh.

Penulis juga akan menganalisa pelaksanaan demokrasi lokal dalam perspektif demokrasi Pancasila berdasarkan sebelas kriteria demokrasi Pancasila yang dikemukakan oleh Munir Fuady, yaitu sebagai berikut : (Munir Fuady, 2010)

- a. Kriteria idealis. Sistem dan pelaksanaan demokrasi harus secara sadar didisain untuk kepentingan-kepentingan yang ideal dari masyarakat dan dapat terjamin tercapainya ideology dan kepentingan masyarakat.
- b. Kriteria empiris. Sistem demokrasi tidak hanya bagus dalam tataran teori dan konsep, tetapi juga dapat diwujudkan ke dalam kenyataan sesuai kondisi objektif dari masyarakat.
- c. Kriteria positif. Harus ada jaminan bahwa sistem dan konsep demokrasi yang sudah dirancang tersebut untuk dapat dipraktikkan. Untuk itu, konsep-konsep demokrasi tersebut haruslah dituangkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.
- d. Kriteria formal. Hal ini menyangkut dengan kelengkapan-kelengkapan demokrasi, seperti adanya proses pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemilihan kepala pemerintahan yang dilakukan melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e. Kriteria substantif. Merupakan demokrasi yang dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang didalamnya terdapat manusia Indonesia yang madani, berbudi luhur, serta mempunyai harkat dan martabat.
- f. Kriteria normatif. Demokrasi harus dapat melahirkan berbagai kaidah yang menjadi kriteria dalam hidup berbangsa dan bernegara, kaidah mana harus ditaati dan dijunjung tinggi baik oleh rakyat maupun oleh penguasa negara.
- g. Kriteria optatif. Demokrasi harus dapat mencapai tujuan-tujuan demi kebaikan manusia, seperti terciptanya negara hukum (*Rechtstaat*) dan negara kesejahteraan sosial (*Social Welfare State*).
- h. Kriteria keberangkatan. Organisasi-organisasi (terutama organisasi pemerintahan) haruslah didesain sedemikian rupa dengan unsur-unsurnya yang memenuhi kriteria modern, efektif, dan efisien, sehingga dapat mewujudkan suatu sistem demokrasi yang baik.
- i. Kriteria psikologis. Pelaksanaan sistem demokrasi haruslah dapat membawa kesejukan yang dapat menimbulkan ketentraman bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air yang tinggi dan penghayatan serta kecintaan yang besar kepada nusa dan bangsa.

- j. Kriteria sosiologis. Demokrasi harus dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat serta harus sesuai pula dengan kondisi riil dalam masyarakat tersebut.
- k. Kriteria prilaku. Keadaan demokratis harus juga tercermin dalam sikap dan tingkah laku masyarakat sehari-hari maupun tercermin dalam pola-pola perilaku para pejabat negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Munir Fuady, pelaksanaan demokrasi lokal saat ini di Indonesia telah memenuhi kriteria idealis, empiris, positif, formal, substantif, normatif, optatif, dan keberangkatan, namun kriteria psikologis, sosiologis dan kriteria prilaku belum terwujud dengan baik karena masih adanya prilaku pejabat korupsi yang tidak mengemban amanah rakyatnya, masih ada prilaku tidak berimbang dalam pemberitaan kampanye di media massa, masih adanya isu SARA yang menjadi kampanye terselubung untuk menjatuhkan peserta pemilihan lainnya, dan masih ada pihak yang tidak siap kalah atas hasil proses demokrasi dimana tim sukses peserta pemilihan yang kalah melakukan aksi anarkisme terhadap orang dan gedung pemerintahan, sebagai wujud ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan.

2. Evaluasi atas Pemilihan Kepala Daerah saat ini berdasarkan Parameter Pemilu Demokratis

Parameter Pemilu Demokratis yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti : (Ramlan Surbakti, 2015)

- a. Hukum pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum.
- b. Kesetaraan antar warga negara
- c. Persaingan yang bebas dan adil
- d. Partisipasi pemilih dalam pemilu
- e. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif.
- f. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas
- g. Keadilan pemilu
- h. Prinsip pemilu tanpa kekerasan.

Penulis akan mengevaluasi pilkada saat ini berdasarkan parameter pemilu demokratis yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti. Parameter pemilu demokratis ini mengevaluasi dari *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.

a. Hukum pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum

Saat ini secara umum undang-undang Pilkada dapat dinyatakan merupakan hukum pemilu yang demokratis telah berkepastian hukum. Regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

b. Kesetaraan Antar Warga Negara

Saat ini masyarakat diminta berperan aktif dalam pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada, karena keaktifan masyarakat adalah kunci untuk akurasi DPT. KPU meluncurkan Gerakan Klik Serentak yang menjadi bagian dalam proses cokolit data pemilih Pilkada 2020 mulai 15 Juli sampai 13 Agustus. Masyarakat dapat mengecek datanya dalam daftar pemilih melalui situs resmi www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Gerakan Klik Serentak ini dilakukan sebelum Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memulai proses cokolit dengan cara mendatangi langsung para pemilih dari rumah ke rumah. Gerakan cokolit serentak akan diikuti oleh 21.210 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 140.241 Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 300.017 PPDP di 309 kabupaten/kota, yang tersebar di 270 daerah pemilihan pada Pilkada Serentak 2020. Dengan demikian parameter kesetaraan antar warga negara dalam Pilkada 2020 telah terpenuhi secara demokratis.

c. Persaingan yang Bebas dan Adil

Untuk menilai persaingan yang sudah berjalan cukup baik antara pasangan calon diciderai oleh adanya kampanye yang berisi informasi bohong dan fitnah serta pemberitaan media yang tidak berimbang.

d. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Dalam Pilkada partisipasi masyarakat sangat menonjol, tergambar dari munculnya semangat voluntarisme atau relawan baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun kalangan seniman yang mendukung pasangan calon.

- e. Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri, Kompeten, Berintegritas, Efisien Dan Kepemimpinan Yang Efektif.

Penyelenggara pemilu berkarakter mandiri memiliki 4 indikator :

- 1) Bukan anggota partai politik, tetapi tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik secara sama
- 2) Tidak berada dibawah lembaga apapun (eksekutif, legislatif, judikatif atau lembaga lain) walaupun melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden atau DPR
- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang tidak berada di bawah tekanan, paksaan, ataupun suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun
- 4) Menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang kompeten (profesional) adalah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang berdasarkan keahlian tentang tata kelola pemilu dan bidang keahlian lainnya.

Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah semua unsur Penyelenggara harus jujur, transparan, akuntabel, dan cermat serta akurat dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Penyelenggara pemilu dapat mencapai efisiensi ditentukan oleh kemampuan dalam perencanaan (perencanaan strategis, perencanaan tahapan, program dan jadwal dan perencanaan operasional).

Penyelenggara pemilu harus memiliki kepemimpinan yang efektif, yaitu memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengajak semua pihak bekerja sama agar seluruh tahapan dan program pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan. Memiliki kepemimpinan yang efektif berarti kemampuan menolak dengan cara yang tegas tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan ataupun tekanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam parameter ini, penyelenggara Pemilu secara umum telah melaksanakan tugasnya secara independen, profesional, transparan, akuntabel dan

melayani pemilih. KPU dan Bawaslu telah menunjukkan transparansi dalam setiap tahapan Pilkada.

f. Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Berdasarkan Asas Pemilu Demokratis dan Prinsip Pemilu Berintegritas

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan KPU.

g. Keadilan Pemilu

Salah satu prinsip penyelenggara pemilu adalah akuntabel. Indikator akuntabilitas ada 2 yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semua pekerjaannya dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga disiapkannya lembaga-lembaga seperti Bawaslu, DKPP, PTUN, Mahkamah Agung sepenuhnya adalah untuk mekanisme akuntabilitas penyelenggara pemilu. Yang menjadi catatan dalam konteks sengketa proses semestinya harus sudah terhenti ketika dimulainya sengketa di Mahkamah Konstitusi, supaya kemudian nanti apa yang diputuskan oleh Bawaslu misalnya juga dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, apakah pertimbangan atau putusannya sudah tepat atau tidak. Jika ada pengaduan ke Bawaslu, pengaduan ke DKPP, ke PTUN atau ke MK tidak selalu kemudian harus dinilai bahwa ada kegagalan dalam pemilu atau gagal dalam proses. Ini harus dimaknai bahwa ada peningkatan kesadaran hukum para aktor-aktor politik, bahwa kalau ada konflik penyelesaiannya tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan jalur secara legal melalui lembaga-lembaga yang telah disediakan. Oleh karena itu meskipun para pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat menggunakan wewenangnya tersebut secara proporsional dan adil. Sehingga menjadi catatan supaya ada kepastian hukum tentang kapan hasil pemilu itu dianggap berakhir.

h. Prinsip Pemilu Tanpa Kekerasan

Pemilu tanpa kekerasan tercipta bila mampu menghindari 2 tindakan yaitu :

- 1) Menciderai atau ancaman menciderai orang atau barang yang berkaitan dengan proses pemilu.
- 2) Menciderai atau ancaman menciderai proses pemilu itu sendiri.

Delapan parameter pemilu yang demokratis diatas, digunakan untuk membuat standar penilaian apakah level *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement* telah terpenuhi atau tidak. Dan Penulis simpulkan bahwa secara umum delapan parameter pemilu demokratis dalam pelaksanaan Pilkada saat ini telah terpenuhi, meskipun ada hal-hal yang terciderei yaitu masih adanya politik uang (*money politic*), kampanye negatif, ketidakadilan dalam pemberitaan oleh media yang tidak berimbang, namun secara hukum aturan-aturan penegakan hukumnya telah terpenuhi baik yang diatur dalam Undang-undang Pilkada itu sendiri, maupun dalam Peraturan KPU sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilu/pilkada itu sendiri.

Beberapa Permasalahan mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun perilaku peserta dan penyelenggara pemilu pun juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Semua perangkat penyelenggara pemilu pusat maupun daerah, peserta pemilu, maupun masyarakat memiliki konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk taat menjalankan putusan mahkamah konstitusi adalah bagian dari ketaatan warga negara terhadap UUD 1945. Konsistensi yakni sebagai wujud pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Wujud konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan dapat berupa optimalisasi kinerja seluruh elemen penyelenggara pemilu, baik pihak lembaga hukum pelaksanaan pilkada maupun para pelaksana pemilu. Selain itu, juga perlu diperhatikan pula perangkat aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan, mekanisme, dan prosedur yang rinci serta sanksi beserta penegakan hukum yang baik dari sisi kepastian hukum maupun dari sisi budaya hukum masyarakat.

Setiap lembaga penegak hukum di Indonesia telah dibentuk sesuai dengan perannya guna menjamin hak-hak demokrasi masyarakat. Maka Pilkada dalam implementasi demokrasi Indonesia harus memenuhi persyaratan penegakan hukum. Hamdan Zoelva mengungkapkan beberapa persyaratan sistem penegakan hukum Pilkada yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif.

- 2) Adanya aturan mengenai sanksi yang jelas atas pelanggaran pemilu.
- 3) Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih.
- 4) Adanya hak bagi pemilih, kandidat, partai politik untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan.
- 5) Adanya kewenangan untuk mencegah hilangnya hak pilih yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan.
- 6) Adanya hak untuk banding, adanya keputusan yang sesegera mungkin.
- 7) Adanya aturan main mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan.
- 8) Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu.
- 9) Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia. (Hamdan Zoelva, 2013)

Dalam kajian yuridis, menurut penulis adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat di daerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

3. Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila

Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR, Pembicara dalam Webinar Nasional AIPI “Meletakkan Konstitusi dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia” tanggal 9 September 2021 mengemukakan kondisi berdemokrasi di Indonesia saat ini :

- a. Partai politik mengajarkan kita agar berdemokrasi tapi partai politiknya sendiri tidak berdemokrasi. Partai politik tidak mengubah sistem internalnya dengan baik. Partai politik adalah sekumpulan orang yang satu ideologi yang berupaya memastikan kehendak kader-kadernya untuk dapat terwujud dalam bernegara. Konsep kaderisasi/ kandidasi tidak jelas, masih ada aroma pertalian dakwah (sama-sama satu kelompok mahasiswa atau kader tertentu), pertalian daerah, pertalian darah, pertalian dana (jika tidak menyumbang partai tidak dapat mencalonkan diri). Jadi yang mulai dibanahi partai politiknya, bukan konstitusinya. Karena Konstitusi kita

- sudah ideal dan sempurna, hanya pada tataran implementasinya budaya kita belum bisa, desentralisasi masih ada, daerah melahirkan kerajaan kecil, pembatasan keluarga petahana untuk mencalonkan pada pemilihan berikutnya gagal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga muncul dinasti politik di daerah, yang terjadi juga di tubuh partai politik.
- b. Masyarakat Indonesia sudah dewasa dan sudah mengerti makna demokrasi langsung, tapi titik lemah dari demokrasi atau pemilu adalah *money politic*. Ternyata demokrasi atau pilkada langsung sama dengan transaksi politik. Efek samping demokrasi/parasit demokrasi adalah *money politic*. Seberapa mampu masyarakat kita memilih calon pemimpin dengan cara independen dan menggunakan ukuran-ukuran rasional bukan ukuran logistik. Realitasnya ingin dilaksanakan secara ideal, tapi ketika menjadi bagian dari calon kontestasi, hal tersebut tidak dapat dihindari. Budaya harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama partai politik. Banyak hal yang dikoreksi termasuk partai politik.
 - c. Demokrasi memunculkan penyakit tirani mayoritas. Di parlemen tidak mengenal ada partai koalisi dan partai oposisi tapi fakta dan prakteknya ada.
 - d. Adanya Tirani minoritas terhadap tirani mayoritas, hanya orang-orang kaya yang menjadi anggota parlemen. Demokrasi itu tidak ada tempat untuk minoritas.

Pemaparan Jazilul Fawaid menunjukkan *das sollen* dan *das sein* tidak seiring sejalan. Namun dalam tataran pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia, menurut penulis sudah terpenuhi wujud pelaksanaan demokrasi. Pemaknaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam perspektif umum banyak kepala daerah yang telah bekerja dengan baik untuk masyarakat, telah menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik, tapi dalam tataran sosial yang mengemuka adalah sisi negatifnya seperti kepala daerah yang tersangkut pidana korupsi. Disini diperlukan sebuah perubahan untuk perbaikan, bukan untuk kepentingan sesaat. Demokrasi perlu diperbaiki, demokrasi tidak akan berjalan jika tidak ada penegakan hukum. Saat ini sistem penegakan hukum di Indonesia juga sudah baik, maka harus ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis akan mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang model pemilihan kepala daerah sebagai berikut :

- a. Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pembicara dalam Webinar Hukum Nasional *Constitutional Law Festival 2021* tanggal 11 September 2021 mengemukakan sebagai berikut :

“...Hukumkan bukan hanya *letterlijk*, kita harus mempelajari *historical reading* dari ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahkan saya selalu bilang *moral and filosofical reading*, baca juga *leading idea*, *leading morality*, *liding values envolfing constitution*. Jadi jangan kaku. Itulah sebenarnya yang menjadi sebab, maka putusan MK yang terdahulu tidak menafikkan 2 kemungkinan tafsir. Tafsir pertama bahwa kepala daerah dipilih tidak secara langsung, boleh. Tafsir kedua kepala daerah dipilih secara langsung. Toh dua-duanya sama-sama demokratis. Bahkan saya berkali-kali dibuku saya, diberbagai forum saya gambarkan, bisa juga ada alternatif ketiga, misalnya di Papua memanfaatkan modernisasi kearifan lokal namanya noken daripada disalahgunakan terus. Kita modernisasi sistem noken itu dengan cara dikonstruksikan sebagai *electoral collect*. Jadi kepala daerah di Papua dipilih tidak melalui pemilu *one man one vote*, tidak langsung melalui DPRD, tapi *electoral collect* misalnya setiap desa, setiap dusun, setiap distrik, kepala desanya memilih satu orang, maka 1000 orang kumpul di jayapura, nah 1000 orang itulah secara adhoc 5 tahun sekali kumpul memilih gubernur. Nah itu namanya noken. Nah misalnya begitu. Jadi kaya *elektoral collect* itukan demokratis juga. Jadi kata dipilih secara demokratis dalam pasal 18 bisa kita jabarkan menjadi tidak langsung oleh DPRD, setengah langsung melalui *electoral collect*, langsung *one man one vote* melalui pemilihan umum seperti yang kita pahami sekarang. Jadi dengan perkataan lain saya kembali ke bagaimana kita memahami pilkada. Pilkada itu ya yang penting kita konsiten. Boleh dinggap langsung, boleh dianggap tidak langsung. Jadi jangan terlalu terpaku kepada soal istilah...”

- b. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Keynote Speaker pada acara Webinar Hukum Nasional *Constitutional Law Festival 2021* tanggal 11 September 2021 menyampaikan sebagai berikut :

Salah satu penanda sebuah negara demokrasi konstitusional adalah adanya pelaksanaan pemilu yang demokratis. Konstitusi kita telah menetapkan neraca kedemokratisan penyelenggaraan pemilu, artinya pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi azas pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Hal inilah yang menjadi nilai inti dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas ini meskipun dilaksanakan secara

langsung dan demokratis tapi abai terhadap kelima asas lainnya serta nilai-nilai Pancasila maka Pemilu seperti ini akan menimbulkan cacat dan noda pada kanvas demokrasi. Oleh karena itu hasil pemilu dari suatu proses demokrasi yang cacat dapat dibatalkan keberlakuannya.

Disisi lain Pemilu yang demokratis tidak hanya dimaknai apabila pemilu itu diselenggarakan secara langsung tetapi juga perlu dimaknai jika pemilu itu diselenggarakan berdasarkan nilai yang termaktub dalam asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E UUD 1945 yakni memenuhi asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Selain itu nilai-nilai Pancasila juga harus dijadikan ruh dalam setiap penyelenggaraan pemilu.”

- c. Yusnani Hasyimzoem, dkk, dalam bukunya Hukum Pemerintahan Daerah menyatakan pemilihan kepala daerah langsung dapat diganti dengan model wali amanah yang pernah dipraktekkan di era Umar bin Khattab.
- d. Ridwan Mukti, dalam Disertasi berjudul Sistem Pemilihan Kepala Daerah Beragam di Indonesia, Implikasi Makna Restriktif dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, menyatakan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan pilkada yang berlaku seragam atau uniformitas di Indonesia dinilai keliru. Pilkada langsung dan seragam bahkan dianggap bertentangan dengan fakta keberagaman Indonesia. Pilkada asimetris atau beragam dinilai lebih tepat diterapkan di Indonesia yang multikultural.

Penulis akan mengemukakan sebuah model Pilkada yang dinamakan dengan Model Pilkada Pancasila yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Model Pilkada Pancasila adalah Pilkada langsung yang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang termaktub dalam Pancasila.

Bahwa kita mengetahui konstitusi kita terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Artinya pasal-pasal itu didasarkan pada pembukaan UUD 1945. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, khususnya alinea keempat telah memuat tujuan negara. Untuk bisa mencapai tujuan negara Indonesia harus berdasarkan pada 5 sila, yang selanjutnya kita sebut sebagai Pancasila. Sehingga ruh Pilkada adalah Demokrasi yang berlandaskan sila-sila dalam Pancasila.

- b. Karakter Pilkada yang Pancasila adalah

- 1) Dari segi akuntabilitas harus mencerminkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa setiap proses Pilkada dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus juga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ada 2 sisi akuntabilitas yang dibangun dalam Pilkada yang Pancasila. Hal ini pula yang dipraktekkan di negara Indonesia dalam menjalankan Negara hukum yang demokratis dan berketuhanan, atau negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum dan berketuhanan.
- 2) Dari sisi teknis pelaksanaan, maka Pilkada harus mencerminkan pelaksanaannya yang mendukung Persatuan Indonesia. Pilkada itu bukan sarana untuk mengkotak-kotakkan antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota yang lain, antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, melainkan harus dapat mempersatukan bangsa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui Pilkada serentak, karena Pilkada serentak merupakan wujud nasionalisme.
- 3) Dalam perspektif demokrasi, wujud dari pengamalan sila kerakyatan, maka *one man one vote* dalam pelaksanaan pilkada masih layak untuk dipertahankan.

c. *Outcome* dari Model Pilkada Pancasila adalah :

- 1) Pilkada itu harus mampu melahirkan sebuah konsep yang berkeadilan sosial, artinya ada nilai-nilai keadilan dalam berdemokrasi, baik dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban para calon, maupun hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemilih.
- 2) Pilkada harus ada efek sosial / perubahan sosial yang baik untuk dalam masyarakat.
- 3) Pilkada harus dapat mewujudkan keadilan yang proporsional dan distributif, keadilan yang berdasarkan kepada proporsinya, jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diterapkan dalam proses Pilkada.

- 4) Pilkada dilaksanakan harus berperi kemanusiaan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang khusus, misalnya bagi kaum disabilitas dan jompo, harus diberi akses atau kemudahan dalam pelaksanaan Pilkada.
 - 5) Pilkada harus mengandung nilai persatuan, artinya pilkada jangan sampai menjadi disintegrasi, tapi harus merekatkan persatuan. Yang menang adalah rakyat, oleh karenanya harus mewakili rakyat.
 - 6) Pilkada harus mengandung nilai demokratis, artinya dalam konsep pilkada itu harus menghasilkan sebuah pimpinan yang mampu mengemban amanah yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
 - 7) Pilkada harus berdimensi keadilan, dalam pelaksanaannya *one man one vote*, memperlakukan calon secara proporsional tidak berat sebelah. Menempatkan masyarakat pun secara proporsional, dengan memberikan informasi dan fasilitas yang baik.
- d. Tujuan dilaksanakan Model Pilkada Pancasilais adalah untuk menghasilkan sebuah kesejahteraan (*welfare state*), sehingga pilkada bukan hanya berdimensi politik rutinitas, tapi juga harus mensejahterakan rakyat.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Demokrasi Lokal dalam Perspektif Demokrasi Pancasila telah terpenuhinya ketiga bagian pilkada tersebut (*electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement*) sangat menentukan kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dan proses pemilu, hanya masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Penulis juga mengevaluasi pilkada saat ini berdasarkan 8 parameter pemilu demokratis yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, dimana delapan parameter pemilu yang demokratis, digunakan untuk membuat standar penilaian apakah level *electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement* telah terpenuhi atau tidak. Dan Penulis simpulkan bahwa secara umum delapan parameter pemilu demokratis dalam pelaksanaan Pilkada saat ini telah terpenuhi, meskipun ada hal-hal yang terciderei yaitu masih adanya politik uang (*money politic*), kampanye negatif, ketidakadilan dalam

pemberitaan oleh media yang tidak berimbang, namun secara hukum aturan-aturan penegakan hukumnya telah terpenuhi baik yang diatur dalam Undang-undang Pilkada itu sendiri, maupun dalam Peraturan KPU sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilu/pilkada itu sendiri. Penulis mengemukakan sebuah model Pilkada yang dinamakan dengan Model Pilkada Pancasila adalah Pilkada langsung yang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang termaktub dalam Pancasila.

Penulis merekomendasikan Pilkada Yang Berdimensi Pancasila, artinya Pilkada langsung yang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila. Perlu dilaksanakan kegiatan penguatan demokrasi Pancasila yang berkesinambungan dengan cara melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mewujudkan substansi demokrasi Pancasila dan moral demokrasi Pancasila (kepatuhan moral terhadap demokrasi Pancasila), mendorong kampanye yang mencerdaskan pemilih, dan mendorong peran maksimal lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, sesuai parameter nilai Pancasila.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Ajat Sudrajat. (2015). *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*.
- Burhan Asofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Hamdan Zoelva. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Konstitusi*, 10(3).
- Munir Fuady. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Refika Aditama.
- Nur Rohim Yunus. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2).
- Ramlan Surbakti. (2015). *Delapan Parameter Pemilu Demokratis*.
- Sunarso. (n.d.). *Demokrasi di Indonesia (Konsep, Transisi, dan Implementasi)*.